

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

T E S I S

**ANALISIS KETENTUAN *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES* DI INDONESIA
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK
YANG RELEVAN DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS KEPUTUSAN *EUROPEAN COURT OF JUSTICE* ATAS *CADBURY SCHWEPPE*
NO.C-196/04- INGGRIS)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi

oleh :

Nama : Alip Subagyo

NPM : 0606017813

Program Studi : Ilmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Jakarta
Desember, 2008

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

Alip Subagyo
0606017813

Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris)

xi + 114 halaman + 6 tabel + 4 gambar + 13 lampiran
Daftar Pustaka 34 buku, 12 artikel (1976 s.d. 2007)

Meningkatnya *foreign investment* merupakan salah satu dampak dari sebuah proses yang kemudian dikenal sebagai *globalization*. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional dan transnasional melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri (*Foreign Direct Investment*). Hal tersebut yang kemudian membuat banyak negara di dunia saling bersaing untuk menarik *Foreign Direct Investment*. Salah satu cara yang paling penting yang dilakukan negara-negara tersebut adalah dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan (*tax haven country*), sesuai dengan pendapat Hines, kebijakan pajak sangat mempengaruhi volume *FDI*.

Kebijakan-kebijakan tertentu di bidang perpajakan pada suatu negara terkadang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing untuk menghindari pajak yaitu dengan skema seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (CFC)*. Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (*anti avoidance rules*). Penghindaran pajak (*anti avoidance rules*) dapat diminimalisir dengan selalu mengikuti

perkembangan yang terjadi sehingga ketentuan yang ada relevan dengan kondisi saat ini, dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi DJP maupun Wajib Pajak.

Pokok Permasalahan dalam tesis ini , pertama adalah kebijakan ini berkaitan dengan investasi Wajib Pajak Dalam Negeri di luar negeri yang selalu meningkat dalam dua tahun terakhir, kedua penerapan CFC Rules di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1994, namun sampai dengan tahun 2008 ini, belum pernah dilakukan perbaikan. Ketentuan *CFC Rules* yang ada sekarang sangat memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: (i) Apakah perbedaan antara *CFC Rules* di Inggris yang lama dan baru dibandingkan dengan *CFC Rules* di Indonesia? (ii) Apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini ? (iii) Apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia sudah memenuhi kepastian hukum ?

Menjawab rumusan pertanyaan di atas, penelitian dilakukan dengan cara analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu dilakukan juga pendalaman studi kasus dengan satu lokus yaitu dengan membandingkan kasus *Cadbury Schweppes* yang terjadi di Inggris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa *CFC Rules* yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Inggris. *CFC Rules* di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan praktik perdagangan yang semakin canggih. Diketahui juga bahwa *CFC Rules* yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum terhadap subjek pajak.

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
ADMINISTRATION SCIENCE STUDY PROGRAM
MAJORING IN TAX ADMINISTRATION AND POLICY

ABSTRACT

Alip Subagyo
0606017813

Analysis of Controlled Foreign Corporation Rules in Indonesia as an Effort to Prevent Relevant Tax Avoidance and Ensure Law Certainty (Case Study, Decree of European Court of Justice on behalf of Cadbury Schweppes No. C-196/04-English).

xviii + 116 pages + 6 tables + 4 pictures + 13 attachments
Library List of 34 books and 12 articles (1976 up to 2007)

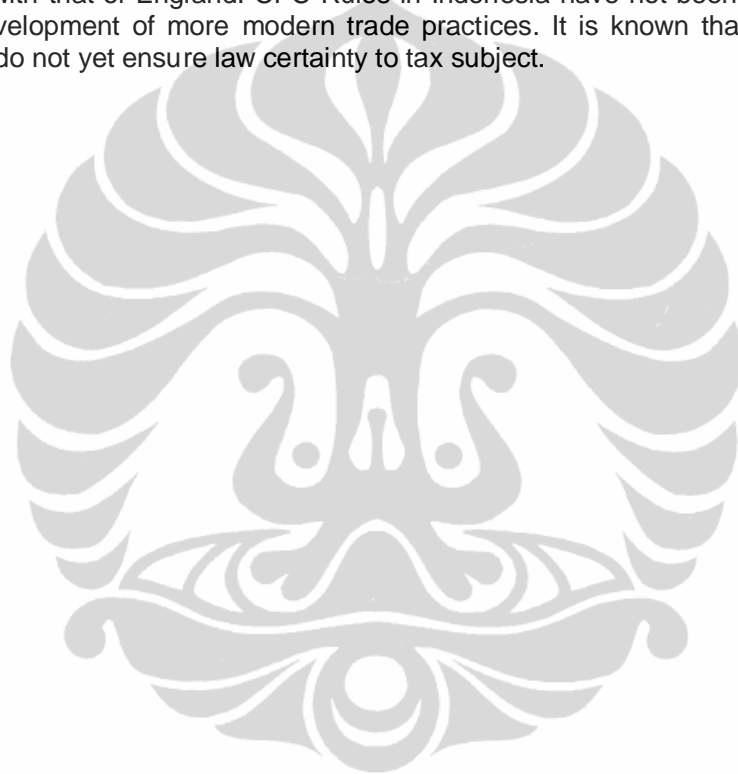
The increase of foreign investment constitutes one of the impacts from a process known as globalization. With any motives and reasons, many multinational dan transnational companies carry out Foreign Direct Investment. This is, because many countries in the world competes each other to attract Foreign Direct Investment. One of the most important this carried out by those countries is to offer incentives in tax (tax haven country), in accordance with Hines opinion, that tax policy significantly influences volume of FDI.

Certain policies in tax in a country are, sometimes, utilized by taxpayers to avoid tax. In international tax context, there are any schemes are usually used by Foreign Investment Companies to avoid tax, those are by transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation (CFC). Therefore, anti avoidance rules are needed. Anti avoidance rules can minimize by always following development happened, accordingly the existing stipulations is relevant with current conditions, and can give good law certainty for Directorate General of Taxes and Taxpayers.

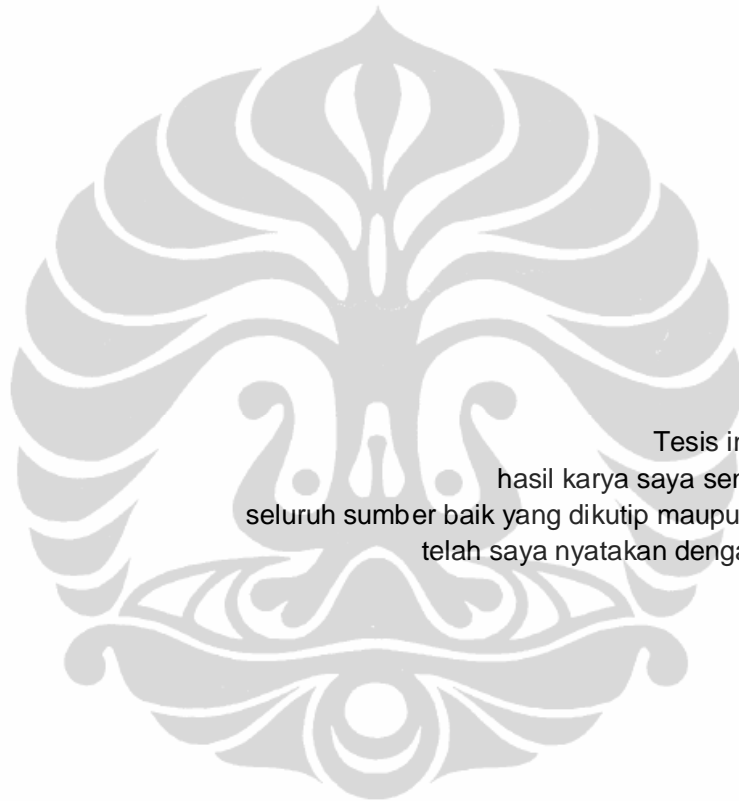
The main problems in this thesis are; first, this policy is related to domestic taxpayer investment abroad always increase in two last years; second, the implementation of CFC Rules in Indonesia has been started since 1994, but up to 2008, there is no improvement. The current stipulations of CFC rules possibly cause Taxpayers carry out tax avoidance. In order to analyze those problems, the following questions are formulated; (i) What is the difference between old and new CFC Rules in England than CFC Rules in Indonesia? (ii) Are stipulations of CFC Rules in Indonesia still relevant to the current conditions? (iii) Have stipulations of CFC Rules in Indonesia fulfilled law certainty?

In order to respond those above mentioned questions, the research is done by qualitative data analysis with descriptive research type where data is described in the kind of information and theories gotten from library study. In addition, intensive case study is carried out in single site locus, which is to compare Cadbury Schweppes case happen in England. Data source in this research is primary data gotten from interview result and secondary data gotten from literatures, books, documents, and research journals which have correlation with this research theme.

From this research, it can be concluded that valid CFC Rules in Indonesia is different with that of England. CFC Rules in Indonesia have not been relevant with the development of more modern trade practices. It is known that current CFC Rules do not yet ensure law certainty to tax subject.



PERNYATAAN ORISINALITAS



Tesis ini adalah
hasil karya saya sendiri, dan
seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Alip Subagyo

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Alip Subagyo
NPM : 0606017813
Judul Tesis : Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris).

Pembimbing Tesis

Dr. Ning Rahayu, M.Si.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Alip Subagyo
NPM : 0606017813
Judul Tesis : Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris).

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang penguji Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan dan telah dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (õ õ õ õ .õ õ .)
Sekretaris Sidang : Zuliansyah P Zulkarnain, S.Sos., M.Si. (õ õ õ õ .õ õ .)
Pembimbing : Dr. Ning Rahayu, M.Si. (õ õ õ õ õ õ .)
Pembaca Ahli : Drs. Iman Santoso, M.Si. (õ õ õ .õ õ õ .)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PERNYATAAN ORISINALITAS



Tesis ini adalah
hasil karya sendiri, dan
seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Alip Subagyo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga tesis yang berjudul Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris)¹, dapat diselesaikan.

Penelitian dalam tesis ini terkait dengan data yang menunjukkan meningkatnya *FDI* yang keluar dari Indonesia. Hal ini perlu dicermati karena berhubungan dengan penggunaan *Controlled Foreign Corporation* di luar negeri untuk melakukan penghindaran pajak. Berkait dengan hal tersebut *CFC Rules* di Indonesia menjadi topik utama dalam pembahasan tesis ini. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan *CFC Rules* yang berlaku di Inggris.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan serta menganalisis perbandingan *CFC Rules* di Inggris yang lama dan baru dengan *CFC Rules* di Indonesia, mengetahui serta menganalisis ketentuan *CFC Rules* di Indonesia dan relevansi nya dengan keadaan saat ini, dan mengetahui serta menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh ketentuan *CFC Rules* di Indonesia.

Pembuatan tesis ini merupakan sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak dukungan dan bantuan yang diperoleh dari para dosen, pimpinan, rekan, dan keluarga tercinta. Untuk itu, pada kesempatan ini ijin penulis untuk menghaturkan terima kasih dari kalbu yang terdalam kepada:

1. DR. Ning Rahayu, M.Si, selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan-masukan dan arah yang sangat berarti sehingga selesainya penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada beliau karena memberikan waktu untuk berdiskusi di tengah kesibukan yang amat padat, terutama di hari-hari terakhir menjelang pengukuhan sebagai Doktor Ilmu Administrasi.

2. Prof. Dr. Benyamin Hoessein, selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Program Pascasarjana FISIP UI.
3. Prof. R. Mansury, PhD. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, dan penjelasan, yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
4. Drs. Rachmanto Surachmat dan Drs. Priyo Handoyo dari kalangan Konsultan Pajak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, dan penjelasan yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
5. Drs. Reza Nurkarim, MBA., Ak. Dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atas penjelasan dan informasi yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Drs. Hermansyah, Budi Susilo, S.E, M.Si., dan Amiruddin Baihaqie, S.E, MM atas dukungan secara moral maupun finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Para pegawai di perpustakaan dan Sekretariat Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan FISIP UI yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.
8. Almarhumah Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang terbaik, yang akan kukenang sepanjang hidup. Terima kasih atas doa dan motivasi tiada henti yang kalian berikan.
9. Kakak dan adik : Sri Rahayu Susilowati, Syam Sutriyono, S.Si, Syam Sutriadi, S.H. Teguh Wahyu Sungkowo, S.E. Gatot Prabowo, S.E. dan Widya Retno Ayuningsari atas doanya.
10. Amanah dari Alloh SWT: Istriku tercinta Faiko Isnaeni, yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayang, serta anak- anakku terkasih Alifia Azzahra, dan Azka Fadillah Rizky yang memberikan inspirasi untuk terus maju dan berjuang dalam kehidupan ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca yang budiman, terutama untuk perkembangan ilmu perpajakan yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2008

Alip Subagyo

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis	vii
Lembar Pengesahan Tesis.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
Bab II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian.....	13
A. Tinjauan Literatur	
A.1. Penelitian Sebelumnya	13
A.2. Kebijakan.....	16
A.2.a. Kebijakan Publik.....	16
A.2.b. Kebijakan Fiskal	18
A.3. Perpajakan Internasional, Hak Untuk Memajaki, dan Metode Penghindaran Pajak Berganda	20
A.3.a. <i>Global Taxation</i> (Perpajakan Internasional).....	20
A.3.b. Teori Justifikasi Legal Hak Pemajakan Suatu Negara	21

A.3.c. Metode Penghindaran Pajak Berganda	22
A.4. Ketentuan Pemajakan atas Perusahaan Luar Negeri Terkendali (<i>Controlled Foreign Corporation Rules / CFC Rules</i>) Sebagai Bentuk Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) melalui Negara Pelabhan Pajak (<i>Tax Haven Country</i>).....	24
A.4.a. Ketentuan Pemajakan atas Perusahaan Luar Negeri Terkendali (<i>Controlled Foreign Corporation Rules/CFC Rules</i>)	24
A.4.b. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	29
A.4.c. Negara Pelabuhan Pajak (<i>Tax Haven Country</i>)	31
A.5. Kepastian Hukum (<i>Certainty</i>)	33
A.6. Hubungan <i>CFC Rules</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	35
A.7. Hubungan <i>CFC Rules</i> dan Prinsip-Prinsip Pajak Internasional	38
A.8. Kerangka Pemikiran	40
B. Metode Penelitian	41
B.1. Pendekatan Penelitian.....	41
B.2. Jenis Penelitian.....	42
B.3. Metode dan Strategi Penelitian	43
B.3.a. Studi Kepustakaan	43
B.3.b. Studi Lapangan	43
B.3.c. Teknik Pengolahan Data	44
B.3.d. Teknik Analisa Data.....	44
B.4. Hipotesis Kerja.....	45
B.5. Nara Sumber	45
B.5.a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak.....	46
B.5.b. Pihak Akademisi.....	46
B.5.c. Pihak Praktisi (Konsultan).....	46
B.6. Proses Penelitian/Informasi	46
B.7. Batasan Penelitian.....	46

Bab III	Perbandingan <i>CFC Rules</i> di Inggris Sebelum dan Sesudah Keputusan <i>European Court of Justice</i> atas <i>Cadbury Schweppes</i> No. C-196/04 dengan <i>CFC Rules</i> di Indonesia	48
A.	Ikhtisar Umum Sistem Perpajakan Inggris atas Penghasilan.....	48
B.	<i>CFC Rules</i> di Inggris Sebelum Keputusan <i>ECJ</i> atas <i>Cadbury Schweppes</i> (versi lama).....	50
B.1.	Peristiwa Perpajakan	50
B.2.	Konsekuensi dari Penerapan <i>CFC Rules</i>	52
C.	<i>CFC Rules</i> Di Inggris Setelah Keputusan <i>ECJ</i> atas <i>Cadbury Schweppes</i>	53
C.1.	Peristiwa perpajakan.....	53
C.2.	Konsekuensi Aplikasi dari Penerapan <i>CFC Rules</i>	56
D.	<i>CFC Rules</i> di Indonesia	57
D.1.	Peristiwa perpajakan.....	58
D.2.	Konsekuensi Aplikasi dari Penerapan <i>CFC Rules</i>	62
D.3.	Perubahan Ketentuan <i>CFC Rules</i> dalam UU No. 36 Tahun 2008	66
E.	Matriks Perbandingan <i>CFC Rules</i> di Inggris Sebelum dan Sesudah Keputusan <i>ECJ</i> atas <i>Cadbury Schweppesi</i> dan <i>CFC Rules</i> di Indonesia	66
Bab IV	Analisis Ketentuan <i>CFC Rules</i> di Inggris Dibandingkan Dengan <i>CFC Rules</i> di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum	72
A.	Analisis Penerapan <i>CFC Rules</i> Inggris Versi Lama Terhadap Kasus <i>Cadbury Schweppes</i>	72
A.1.	Gambaran Kasus.....	72
A.2.	Penerapan <i>CFC Rules</i> Inggris Versi Lama Terhadap Kasus <i>Cadbury Schweppes</i>	73
B.	Analisis Penerapan <i>CFC Rules</i> Inggris Versi Baru Terhadap Kasus <i>Cadbury Schweppes</i>	77
B.1.	Penerapan <i>CFC Baru</i>	77

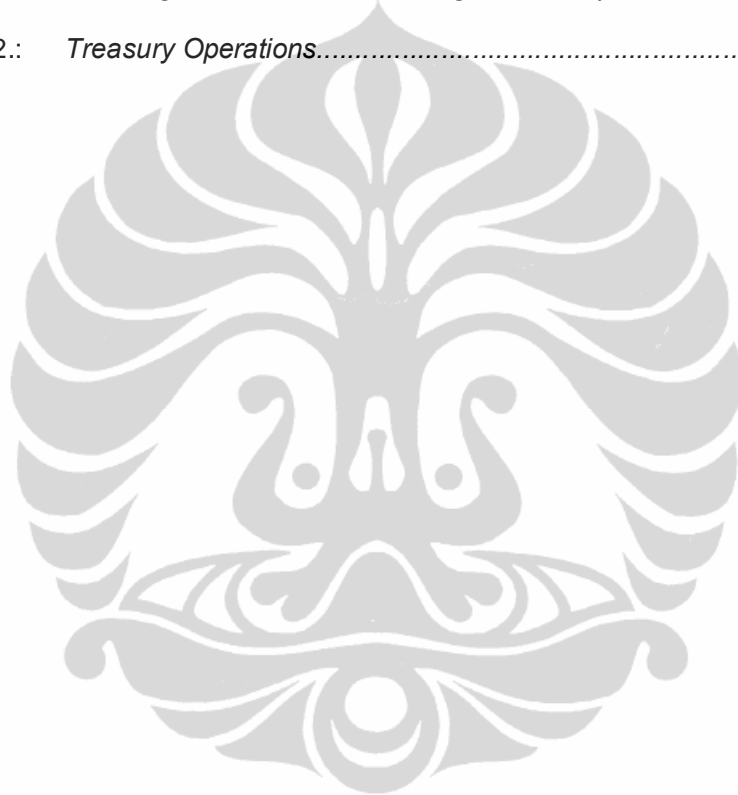
C.	Analisis Perbandingan <i>CFC Rules</i> Inggris Versi Lama dan Baru Terhadap Kasus <i>Cadbury Schweppes</i>	83
D.	Analisis Relevansi <i>CFC Rules</i> yang Berlaku di Indonesia dengan Kondisi Saat Ini.....	86
D.1.	Analisis Tujuan <i>CFC Rules</i>	86
D.2.	Analisis <i>CFC Rules</i> Indonesia	90
E.	Analisis Kepastian Hukum <i>CFC Rules</i> yang Berlaku di Indonesia.....	106
E.1.	Analisis Pemenuhan Kepastian Hukum Terhadap Siapa Yang Dikenakan Pajak (Subjek Pajak).....	106
E.2.	Analisis Pemenuhan Kepastian Hukum Terhadap Apa Yang Menjadi Dasar Dikenakan Pajak (Objek Pajak).....	108
E.3.	Analisis Pemenuhan Kepastian Hukum Terhadap Berapa Jumlah Yang Harus Dibayar (Tarif Pajak).....	109
E.4.	Analisis Pemenuhan Kepastian Hukum Terhadap Bagaimana Pembayaran Pajak Yang Terutang (Prosedur Pajak).....	109
Bab V	Simpan dan Saran	111
A.	Simpan.....	111
B.	Saran	112
	Daftar Pustaka.....	113
	Lampiran	
	Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1. : <i>Global FDI flows, top 20 economies, and Indonesia 2005, 2006</i>	2
Tabel I.2. : <i>FDI Indonesia 1994-2006</i>	3
Tabel I.3. : <i>Penerimaan Perpajakan 1994/1995-2008</i>	4
Tabel II.1. : <i>Matriks Penelitian tentang CFC Rules di Indonesia Sebelumnya</i>	13
Tabel III.1. : <i>Matriks Perbandingan CFC Rules di Inggris Sebelum dan Sesudah Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes dan CFC Rules di Indonesia</i>	67
Tabel IV.1. : <i>Matriks Analisis Perbandingan CFC Rules Inggris Versi Lama dan Baru Terhadap Kasus Cadbury Schweppes</i>	83

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar II.1. : Tahap-Tahap Kebijakan (William N. Dunn).....	18
Gambar II.2. : Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar IV.1.: <i>Diverting Profits To A CFC Using Intra Group Loans</i>	81
Gambar IV.2.: <i>Treasury Operations</i>	82



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : Pedoman wawancara kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak
- Lampiran 2. : Pedoman wawancara kepada Akademisi
- Lampiran 3. : Pedoman wawancara kepada Praktisi (Konsultan)
- Lampiran 4. : Hasil wawancara dengan Drs. Riza Nurkarim, MBA., Ak.
- Lampiran 5. : Hasil wawancara dengan Prof. R. Mansury, Ph.D.
- Lampiran 6. : Hasil wawancara dengan Drs. Rachmanto Surachmat.
- Lampiran 7. : Hasil wawancara dengan Prijohandojo Kristanto
- Lampiran 8. : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Lampiran 9. : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Lampiran 10 : Keputusan Menteri Keuangan 650/KMK.04/1994 Tanggal 29 Desember 1994 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- Lampiran 11 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ.4/1995 Tanggal 26 April 1995 Tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri PPh Umum No. 10)
- Lampiran 12 : Surat Edaran Direktur Jenderal pajak SE-35/PJ.4/1995 Tanggal 7 Juli 1995 Penegasan Lebih lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri Pph Umum No. 16).

Lampiran 13: *Press Release No. 72/06 Judgment of the Court of Justice in
Case C-196/04 : Cadbury Schweppes plc & Cadbury
Schweppes Overseas Ltd v Commisioners of Inland Revenue*

